

Peluang Dan Tantangan SDM Bali Serta Strategi Dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G20

Ni Putu Diah Mustika Yanthi¹, Ni Made Yudhaningsih², I Made Anom Arya Pering³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahendradatta Denpasar

email: diahmustikayanthi@gmail.com

Citation: Yanthi, N.P.D.M., Yudhaningsih, N.M., & Pering, I.M.A.A. (2022). Peluang Dan Tantangan Sdm Bali Serta Strategi Dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G20. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(4), 633–645.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/159>

Received: 27 Juli 2022

Accepted: 7 Agustus 2022

Published: 22 Agustus 2022

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

This study aims to examine and analyze the role of the Opportunities and Challenges of Bali's Human Resources in Welcoming the Activities of the G20 Presidency. This study uses data collection techniques with the method of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis. The results of this study indicate that (1) The opportunities generated from the activities of the G20 Presidency can create economic cycles both micro and macro that are more significant than before. Moreover, the province of Bali in this case being the venue for the peak event of the G20 Presidency will be able to boost the existence of Bali tourism in the eyes of the world. (2) The challenge that will be faced by Bali's HR is competition with foreign workers which can suppress local HR job opportunities. (3) The strategy that must be used in taking advantage of opportunities and responding to challenges is to improve the quality of human resources, open up more economic sectors for investment, prepare economic and industrial infrastructure, and improve national education. as possible and able to compete with other countries.

Keywords: Opportunities, Challenges, Human Resources, G20 Presidency

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis peran Peluang Dan Tantangan Sumber Daya Manusia Bali Dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G20. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Peluang yang di dihasilkan dari kegiatan Presidensi G20 tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi baik secara mikro maupun makro yang lebih signifikan dari sebelumnya. Terlebih lagi, provinsi Bali dalam hal ini menjadi tempat penyelenggaraan acara puncak Presidensi G20 akan dapat mendongkrak eksistensi pariwisata Bali di mata dunia. (2) Tantangan yang akan di hadapi oleh SDM Bli yaitu persaingan

dengan tenaga kerja asing yang dapat menekan peluang kerja SDM local. (3) Straregi yang harus digunakan dalam memanfaatkan peluang serta menjawab tantangan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM, membuka lebih banyak sektor ekonomi untuk investasi, menyiapkan infrastruktur ekonomi dan industri, dan meningkatkan pendidikan nasional perlu dihiraukan untuk menarik lebih banyak investasi asing Bali sehingga dapat memaksimalkan peluang sebaik mungkin dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Kata Kunci: *Opportunities, Challenges, Human Resources, G20 Presidency*

PENDAHULUAN

Indonesia diberikan kepercayaan untuk meneruskan presidensi G20 dari Negara Italia. Untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 yang akan dilaksanakan pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Dengan terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah dalam kegiatan presidensi G20, Presiden Indonesia secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan di Bali pada bulan Oktober 2022. Segala persiapan telah dilakukan Bali untuk mensukseskan pelaksanaan G20. Diantaranya persiapan infrastruktur, penataan mangrove yang akan dijadikan showcase oleh pemimpin dunia yang nanti akan hadir. Selain itu protokol kesehatan bagi para peserta G20, baik kedatangan maupun keberangkatan juga menjadi salah satu hal penting. Selain itu, penataan jalur dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju venue di Nusa Dua, Badung akan ditata dengan baik, hijau dan indah. Sementara untuk sisi keamanan, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan jika semuanya telah berjalan dengan baik di bawah komando Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali, dan fasilitas pelaksanaan G20 di Bali semua telah berjalan dengan baik. Sumber Daya Manusia di Bali juga harus memiliki tanggungjawab untuk ikut mensukseskan G20 sebagai salah satu bentuk recovery pariwisata dan perekonomian masyarakat. Berkaitan dengan itu, masyarakat Bali juga menyambut dengan respon positif dan penuh antusias dari warga Bali khususnya pelaku Pariwisata, mereka pun sangat berharap kegiatan tersebut membawa dampak positif terhadap perekonomian Bali terutama pada sector pariwisata dan perekonomian mikro di Bali.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Presidensi G20 di Indonesia, Bali memiliki peluang yang sangat besar untuk memulihkan kembali perekonomian dan sektor pariwisata. Perhelatan yang diikuti oleh 20 negara tersebut juga bisa dijadikan momentum untuk mempromosikan Pariwisata Bali yang telah mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 dan mengenalkan produk-produk lokal yang ada. Hadirnya delegasi asing dari negara-negara anggota dalam rangkaian acara Prsidensi, akan mendatangkan investasi dari luar negeri. Dalam memanfaatkan peluang yang akan tercipta dari kegiatan Presidensi G20 ini kita memerlukan strategi-strategi yang benar dan tepat sasaran. Disinilah diperlukan analisis-analisis dari para Ekonomi yang dapat dijadikan sebagai naskah akademik untuk ditinjau dan dievaluasi sehingga dapat diajukan ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan dan program-program yang tepat sehingga mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang baik.

Selain membutuhkan strategi yang tepat dalam memanfaatkan peluang tersebut, juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, karena jika Sumber Daya Manusia yang ada

tidak dapat menjawab tantangan dari peluang yang ada maka, akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang tidak maksimal. Perlu adanya kesiapan dari Sumber Daya Manusia kita untuk bisa menjawab tantangan dari peluang yang ada sehingga dapat menyerap tenaga kerja dengan maksimal. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang menganggur. Jika penyerapan tenaga kerja maksimal maka jumlah tenaga kerja yang menganggur akan berkurang secara signifikan. Apabila angka pengangguran mengalami penurunan secara signifikan maka akan berimplikasi pada sistem perputaran perekonomian mikro dan pertumbuhan UMKM menjadi positif.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa potensi terbesar yang dimiliki Bali adalah di bidang pariwisata. Potensi tersebut dikarenakan Pulau Bali memiliki alam yang sangat indah sehingga banyak diminati oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyaknya pariwisata di Bali menyebabkan lebih banyak masyarakat Bali berkecimpung di bidang pariwisata, hal ini dapat dilihat dari perputaran ekonomi Bali yang bertumpu pada Pariwisata. Dari besarnya potensi pariwisata Bali, menyebabkan sebagian besar anak muda di Bali termotivasi untuk mempelajari pengetahuan pariwisata, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sekolah pariwisata dengan jumlah siswa dan siswi yang tertarik untuk mengambil jurusan pariwisata. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Sumber Daya Manusia di Bali mayoritas di bidang Pariwisata.

Pada akhir tahun 2019 pariwisata mulai menurun drastis akibat Pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan tidak adanya kunjungan wisatawan ke Bali sehingga banyak perusahaan yang berkecimpung di sektor Pariwisata gulung tikar dan para pekerja terkena dampak pemutusan hubungan kerja, yang mempengaruhi menurunnya daya beli dari masyarakat. Hal ini menyebabkan krisisnya perekonomian di Bali mengingat potensi terbesar di Bali hanya pada sektor pariwisata. Melalui kegiatan Presidensi G20 ini diharapkan mampu memulihkan perekonomian Bali, terutama pada sektor pariwisata. Dari uraian di atas muncul pertanyaan besar bagi penulis yang mana pertanyaan ini cukup relevan bagi masyarakat Bali, yaitu, peluang apa sajakah yang akan tercipta dari kegiatan Presidensi G20? bagaimana dampak kegiatan presidensi G20 terhadap UMKM Bali?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku atau fenomena yang diamati. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara terhadap subyek penelitian yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan konsep manajemen strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu peluang yang ada dalam acara internasional Presidensi G20 adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem

keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.¹ Program PEN merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali terjadi di Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019. Setelah melalui serangkaian upaya serta mempertimbangkan cepatnya penyebaran Covid-19 dan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan, World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 12 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Meluasnya kasus Covid-19 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus paling banyak di antara negara-negara ASEAN sejak tanggal 17 Juni 2020 melampaui Singapura. Selain masalah kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak yang sangat serius pada bidang sosial-ekonomi.

International Monetary Fund (IMF) bahkan mendeklarasikan bahwa ekonomi dunia sedang memasuki masa krisis dengan skala yang lebih besar dibanding krisis keuangan 2008.² Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan I Nyoman Gede Gunadika (Tanggal 3 Juni 2022), beliau mengatakan bahwa terselenggaranya Presidensi G20 di Indonesia khususnya dibali tentunya dapat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan hadirnya delegasi asing dari negara-negara anggota dalam rangkaian acara presidensi G20, akan mendatangkan investasi dari luar negeri karena ketika KTT G20 ini berlangsung akan mendatangkan sekitar 21 ribuan orang yang akan hadir, berdasarkan literasi dari pemerintah, dengan meningkat pasti akan ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Dalam menyambut event internasional yang besar yang akan dilaksanakan di Bali tentunya juga diharapkan dapat mempengaruhi perekonomian di Bali, salah satu peluang yang dapat terjadi dengan terlaksananya Presidensi G20 di Bali adalah dapat menjadikan Sumber Daya Manusia di Bali atau volunteer dari Bali untuk ikut bergabung sebagai panitia penyelenggara kegiatan G20.

I Nyoman Gede Gunadika juga mengatakan dengan terselenggaranya Presidensi G20 di Bali diharapkan memberi dampak peningkatkan konsumsi domestic, baik itu dari segi pemesanan hotel, peningkatan hunian kamar, hingga konsumsi para tamu yang di siapkan oleh Sumberdaya Manusia di Bali, Presidensi G20 juga di harapkan dapat penambahan Produk Domestik Bruto Nasional, Produk domestik bruto (PDB) adalah total produksi (output) yang dihasilkan oleh pemerintah. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Produk domestik bruto merupakan konsep dalam perhitungan pendapatan nasional (Sukirno, 2015).

Dalam analisis makro ekonomi selalu digunakan istilah “pendapatan nasional” atau “national income” dan biasanya istilah itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa

yang dihasilkan dalam suatu negara. Dengan demikian dalam konsep tersebut istilah pendapatan nasional adalah mewakili arti produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) (Sukirno, 2015). Dan mendukung perekonomian kecil masyarakat Bali dengan melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Bali.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu kesempatan usaha bisnis yang produktif, yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan memenuhi segala macam kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Usaha kecil menengah di Indonesia menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas dan dapat memainkan peran dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Bentuk usaha kecil menengah dalam bentuk kepemilikan tunggal, kemitraan, perusahaan dan CV serta perseroan terbatas.

Dari perspektif dunia mengakui bahwa UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya Negara-negara berkembang, tetapi pada Negara maju juga. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia, UMKM juga memiliki kelemahan seperti; kualitas sumber daya manusia, badan hukum dari UMKM, pinjaman modal, dan kurangnya pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi hambatan di lapangan. Dalam event internasional yang sangat besar seperti Presidensi G20 juga diharapkan memberikan dampak pada Sumber Daya Manusia yang ada di Bali dengan menjadikan masyarakat Bali sebagai bagian dari terlaksananya event internasional ini dengan penyerapan ribuan tenaga kerja di berbagai sektor guna berjalan lancar acara besar ini.

Hal ini tentunya juga dapat menjadi suatu bagian dalam menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia di Bali dapat di andalkan dalam membantu Pemulihan Ekonomi Nasional melalui acara Presidensi G20, hal ini juga di sampaikan oleh I Nyoman Gede Gunadika bahwa acara internasional sebesar Presidensi G20 dapat menjadi kesempatan untuk unjuk diri sebagai tuan rumah dalam ajang perhelatan kelas dunia. Dimana pulau Bali dapat menjadi salah satu destinasi wisata turis. Selain dari segi ekonomi, penyelenggaraan Presidensi G20 juga memberikan peluang di sector pariwisata. Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Youti, (1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*reave!*" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata "pariwisata" dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Tour*".

Menurut Mill dan Morisson (1985). Ada beberapa variabel sosioekonomi yang mempengaruhi permintaan pariwisata, yaitu : 1) Umur, Hubungan antara pariwisata dan juga umur mempunyai dua komponen yaitu : besarnya waktu luang dan aktifitas yang berhubungan dengan tingkatan umur tersebut. Terdapat juga beberapa perbedaan pola konsumsi antara kelompok yang lebih tua dengan kelompok yang lebih muda. 2) Pendapatan, Pendapatan merupakan faktor terpenting dalam membentuk permintaan untuk mengadakan sebuah perjalanan wisata. Bukan hanya perjalanan itu sendiri yang memakan biaya wisatawan juga harus mengeluarkan uang untuk jasa yang terdapat pada tujuan wisata dan juga di semua aktifitas selama mengadakan perjalanan. 3) Pendidikan, Tingkat pendidikan mempengaruhi tipe dari waktu yang luang untuk digunakan dalam perjalanan yang dipilih. Selain itu juga pendidikan merupakan suatu motivasi untuk melakukan perjalanan wisata. dapat juga disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pandangan seseorang dan memberikan lebih banyak pilihan yang bisa diambil oleh seseorang.

Sedangkan berdasarkan undang-undang no 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia tuhan yang maha esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi pariwisata memang tidak pernah persis diantara para ahli. Pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Tetapi apabila dilihat dari segi konteks pariwisata bertujuan untuk menghibur dan juga mendidik.

Hal ini juga diungkap oleh I Nyoman Gede Gunadika beliau mengatakan bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 juga memberikan peluang yang baik dalam bidang pariwisata. Dengan Memperkenalkan pariwisata. Dengan adanya pertemuan delegasi di berbagai kota bisa membantu meningkatkan sektor pariwisata kita yang telah mengalami penurunan sejak tahun 2020 lalu. Salah satunya dengan mengenalkan berbagai produk lokal yang ada. Sehubungan dengan hal itu, bisa memicu kedatangan wisatawan dan berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Selain dari dua sector diatas, terselenggaranya Presidensi G20 di Bali juga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bali, seperti yang di ungkap I Nyoman Gede Gunadika, beliau mengatakan bahwa peluang yang cukup besar dalam memperdayakan sumber daya manusia di Bali dengan adanya perhelatan akbar sebesar Presidensi G20 yang bertaraf internasional, di lain sisi penyelenggaraan Presidensi G20 juga dapat menjalin hubungan bilateral antar negara. Dari hal ini, kita dapat mengukur bagaimana kekuatan sumber daya manusia di Bali, seperti yang dikatan I Nyoman Gede Gunadika Dalam wawancara bahwa kegiatan G20 di Bali dengan meangselarasi dan meningkatkan vaksinasi booster bagi pelaku pariwisata dan SDM pariwisata demi meningkatkan kepercayaan wisatawan ke Bali Melakukan sertifikasi CHSE terhadap industry pariwisata dan DTW demi peningkatan kepercayaan wisatawan yang ingin mengunjungi akomodasi di Bali.

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya

bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegangan pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (*power*). Pendapat tersebut relevan dalam kerangka berfikir bahwa agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya (Sutrisno, 2011).

Dalam meningkatkan kekuatan sumber daya manusia, tentunya lah ini harus memiliki strategi. Strategi SDM berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya yang tepat, perencanaan SDM, mengaudit SDM baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan SDM (dari rekrutmen sampai seleksi), orientasi, pemeliharaan pelatihan dan pengembangan SDM, penilaian SDM. Dalam menentukan strategi SDM, faktor-faktor eksternal perlu dipertimbangkan mengacu pada *future trends and needs*, *demand and supply*, peraturan pemerintah, kebutuhan manusia pada umumnya dan karyawan pada khususnya, potensi pesaing, perubahan-perubahan sosial, demografis, budaya maupun nilai-nilai, teknologi. Kecenderungan perubahan lingkungan akan mempengaruhi perubahan strategi perusahaan yang juga berarti bahwa strategi SDM pun perlu dipertimbangkan ulang, dan kemungkinan besar perlu disesuaikan.

Untuk mengevaluasi SDM perlu dipertimbangkan empat faktor sebagai berikut : 1) Tingkat strategi, antara lain: misi, visi, dan sasaran organisasi. 2) Faktor internal SDM, antara lain: aset SDM, kualifikasi SDM, aktivitas SDM: pengadaan, pemeliharaan, pelatihan dan pengembangan, serta kebijakan-kebijakan SDM. 3) Faktor-faktor eksternal, antara lain: demografis, perubahan sosial, budaya, teknologi, politik, peraturan pemerintah, pasar tenaga kerja, dan isu internasional (misal: HAM dan ekologi). 4) Faktor organisasional, antara lain: struktur, strategi perusahaan, budaya perusahaan, dan strategi SDM.

Juga perlu di perhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, Perencanaan sumber daya manusia adalah proses/langkah yang akan dilakukan terhadap SDM dalam organisasi (baik pada perusahaan ataupun pada lembaga pendidikan), yaitu berupa pengadaan SDM (personel/personalian ke pegawaiian) yang tepat, dalam waktu yang tepat, sebagai upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses dimana para manajemen menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat ditempat kerja yang pas, dan pada saat yang tepat mampu menyelesaikan tugas-tugas yang akan menolong organisasi tersebut mencapai sasaran-sasaran secara keseluruhannya secara efektif dan efisien. secara sederhana proses ini dapat disingkat menjadi tiga langkah, yaitu sebagai berikut: 1) Menilai sumber daya manusia yang ada sekarang. 2) Menilai kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia masa depan. 3) Mengembangkan suatu program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia masa depan (Purwanto, 2006).

Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. (Drs. Malayu S.P. Hasibuan 10). Adapun tujuan perencanaan SDM adalah sebagai berikut: 1) Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2) Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 3) Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4) Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) sehingga produktivitas kerja meningkat. 5) Untuk

menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. 6) Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7) Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horizontal) dan pensiun karyawan. 8) Menjadi dasar dalam melakukan penelitian karyawan (Hasibuan, 2002)

Dengan adanya perencanaan SDM, banyak manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 1) SDM yang ada dalam organisasi dapat lebih dioptimalkan. Bila kita sudah mengetahui tentang jumlah SDM, pendidikannya, masa kerjanya, keterampilan khususnya dan sebagainya, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan promosi, atau alih tugas yang lebih tepat sesuai dengan harapan SDM yang dimaksud. 2) Produktifitas kerja SDM yang ada dapat lebih ditingkatkan. Produktifitas akan lebih dapat ditingkatkan apabila kita mempunyai data pekerjaan dan pelatihan yang telah dimiliki oleh SDM. 3) Kebutuhan SDM masa datang dapat sepat diperkirakan. Hal ini dapat dipahami data yang ada, kita dapat mengetahui potensi SDM yang ada, baik jumlah ataupun minatnya. Bila ada perubahan struktur organisasi misalnya, atau perluasan baru dan sebagainya tentu kita dapat melihat pengisian SDM yang dibutuhkan. 4) Informasi tentang SDM dapat selalu tersedia. Hal tersebut memungkinkan, sebab suatu perencanaan SDM, biasanya berisi informasi tentang jumlah SDM, masa kerja, pendidikan, jabatan yang ada, besarnya penghasilan, status perkawinan, jumlah keluarga, keahlian khusus dan sebagainya. 5) Pasar tenaga kerja lebih dapat diketahui. Pasar kerja merupakan sumber mencari calon-calon SDM yang potensial untuk diterima (recruiting) dalam organisasi. 6) Dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun program-program pengembangan organisasi. Program SDM salah satu sumbangan acuan. Tetapi dapat pula berasal dari sumber lain. Namun adanya data yang lengkap tentang potensi SDM akan lebih mempermudah usaha kita untuk menyusun program yang lebih matang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan (Nurdin, 2006)

Namun dalam hal ini tentu ada kekurangan, kekurangan sumber daya manusia di Bali, sebagaimana yang di ungkap I Nyoman Gede Gunadika adalah Masih adanya beberapa factor yang menyebabkan Kuantitas SDM Bali belum mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memberdayakan dan Adanya globalisasi tenaga asing / peran serta tenaga asing yang terlibat dalam kegiatan G20 ini. Hal ini juga tentunya memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia di Bali, seperti yang dikatakan narasumber yaitu I Nyoman Gede Gunadika bahwa SDM Bali mendapat kesempatan untuk unjuk diri sebagai tuan rumah dalam ajang perhelatan kelas dunia. Perhelatan ini juga dapat sebagai pembuktian kuantitas SDM Bali di tingkat internasional. Dapat sebagai kesempatan bagi SDM Bali khususnya untuk menjalin kerjasama dengan delegasi dari berbagai negara.

Tentunya dengan penyelenggaraan Presidensi G20 di Bali akan berdampak pada Indonesia, salah satunya adalah hubungan bilateral antar negara, Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis atau subjek kebijakan dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatis atau keduanya. Seperti yang diungkapkan Jackson dan Sorensen mengenai Hubungan Internasional bahwa : "Fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah atau negara-negara merdeka yang sangat mengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson dan Sorensen, 2013:4).

Para prinsipnya tujuan studi Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara (organisasi internasional) di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa terwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional. Di samping itu bisa juga dijadikan sebagai pengembang pendidikan bagi para pemimpin akan dijadikan dalam kaitannya dengan pemahaman Hubungan Internasional khususnya bagi orang yang berkecimpung dalam tingkat kepemimpinan di dunia. Oleh sebab itu disiplin Hubungan Internasional bekerjasama dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Maka dalam kegiatannya penelitian misalnya dapat berlangsung di perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintahan dan juga lingkungan organisasi-organisasi internasional (Sitepu, 2011:8). Hal ini juga di ungkap oleh I Nyoman Gede Gunadika Bahwa penyelenggaraan G20 di Bali memberi peluang menjalin kerja sama dengan negara delegasi. Dari pertemuan internasional yang masih diadakan di masa pandemi ini, kita berharap dapat menjalin kerja sama salah satunya ketersediaan vaksin. Tentunya dalam penyelenggaraan event besar ini akan memberi tantangan bagi Indonesia dan Bali sebagai pulau yang dipilih dalam menyelenggarakan acara internasional ini.

Tantangan ini akan di dapat oleh sumber daya manusia di Bali yang terlibat atas terselenggaranya event besar ini. I Nyoman Gede Gunadika mengatakan tantangan besar itu adalah Adanya tantangan globalisasi tenaga asing / peran serta tenaga asing yang terlibat dalam kegiatan G20 ini. Dimana tenaga asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Boediono pengertian tenaga kerja asing adalah : "Tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."

Pemerintah sudah mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia hal itu tertuang dalam Dalam pasal 1 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dimaksud dengan : (1) Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. (2) Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. (3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (4) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. (5) Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut VITAS adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja. (6) Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut ITAS adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja. (7) Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain yang telah terintegrasi.

Selain hal itu tantangan terbesar yang dikatakan oleh I Nyoman Gede Gunadika adalah kurangnya pengetahuan sumber daya manusia di Bali tentang G20. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya pemahaman bagi masyarakat tentang penyelenggaraan G20 ini. Salah satu tantangan yang menjadi pertimbangan saat mengadakan Event Internasional Presidensi G20 adalah kurangnya fasilitas bagi Sumber Daya Manusia di Bali. Unsur manusia dan sistem sosialnya memegang peranan penting dalam pembangunan, bahkan pembangunan akan berhasil hanya kalau dia sekaligus membangun manusia pembangun. Membangun manusia pembangun berarti mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki kualitas tinggi. Pengembangan yang dimaksud adalah usaha membina dan mendayagunakan potensi kemanusiaannya, sehingga kemampuan yang dimilikinya dapat dikerahkan baik dalam bentuk tenaga, gagasan, intelektualitasnya guna mencapai taraf hidup yang lebih baik (Soetrisno dan Mary Johnston, 1982).

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia merupakan persoalan yang rumit. Untuk memecahkannya memerlukan strategi yang akurat dan biaya yang tidak sedikit, karena pengembangan ini tidak hanya sebatas pada peningkatan kualitas teknis tetapi kualitas lainnya yang memungkinkan seseorang menjadi manusia unggul dan utuh. Pendayagunaan sumber daya manusia berorientasi pada terciptanya tenaga kerja yang dapat bekerja secara optimal sesuai dengan keahliannya. Kualitas tenaga kerja ditunjukkan oleh tingkat produktivitasnya, oleh karena itu produktivitas ini harus selalu ditingkatkan. Produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi oleh faktor sosial-demografis, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, etos kerja, serta kebiasaan masyarakat. Sayangnya, hingga kini belum pernah ada pengukuran secara teliti tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia (Sigit, 1999).

Sebagai penduga produktivitas, banyak pihak memakai output atau nilai tambah per tenaga kerja. Padahal output atau nilai tambah per tenaga kerja ini hanya tepat digunakan untuk analisa perbandingan antar sektor atau untuk mengikuti perkembangannya antar tahun. Secara normatif semestinya bagi manusia Indonesia, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap gejala dehumanisasi karena GBHN (lihat Bab IV Subbab D Masalah pembangunan ekonomi, bag 10) telah memberikan arah terhadap permasalahan pembangunan sumber daya manusia (manusia sebagai tenaga kerja), disitu dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri. Hanya saja, di dalam prakteknya kita menjadi pesimis karena tampaknya pemerintah tidak berupaya secara sungguh-sungguh mengarahkan pembangunan tenaga kerja sesuai dengan GBHN.

Kenyataan terusnya tenaga kerja Indonesia (TKI) secara terhina di Malaysia pada pertengahan tahun 2002 ini sungguh merupakan potret buram hasil pembangunan SDM Indonesia. Bagaimana mungkin tercipta manusia Indonesia berkualitas yang bermartabat dan bermartabat, keamanan dan keterlindungan dalam bekerja saja tidak ada, ini karena tak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melindungi warganya, terutama buruh. Hanya berhadapan dengan tuntutan kehidupan minimal penduduknya saja pemerintah tidak dapat memenuhi, bagaimana dapat bertahan menghadapi pengaruh hegemoni teknologi/mesinisasi di segala aspek di era global ini.

Berdasarkan kenyataan lemahnya usaha pembinaan dan pembangunan SDM di Indonesia dapat diduga bahwa pada akhirnya dalam segala level pekerjaan di era global, nasib tenaga kerja kita akan terdesak oleh tenaga kerja luar negeri yang akan membanjiri Indonesia dan tersapu oleh gejala mesinisasi yang mereduksi kemanusiaannya. Sebenarnya betapapun tingginya teknologi, manusia tidak boleh terkuasai oleh teknologi, dengan demikian harkat dan martabat kemanusiaannya tidak tereduksi. Sebaliknya manusia Indonesia harus mampu

meningkatkan penguasaan terhadap iptek agar bangsa Indonesia tidak menjadi objek dan pasar penampung hasil teknologi bangsa lain saja, dan pada akhirnya dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain. Untuk mencapai harapan itu, maka pengembangan ketenagakerjaan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan.

Dengan usaha yang demikian, generasi tenaga kerja mendatang memiliki etos kerja tinggi, produktif, kreatif, bukannya generasi pemalas karena segala kebutuhannya telah terpenuhi produk teknologi negara lain. Generasi penikmat teknologi inilah yang kemudian mengkultuskan teknologi dan melahirkan masyarakat materialistis dan konsumtif (Yacob, 1988). Di samping merebaknya gejala dehumanisasi akibat industrialisasi, tenaga kerja di era global juga mempunyai tantangan yang sangat berat. Bila tidak ada usaha peningkatan kualitas ketenagakerjaan Indonesia, maka pada era pasar bebas pada tingkat Asia saja (dimulainya AFTA 2003) dimana tenaga kerja luar negeri dapat secara leluasa masuk ke Indonesia, tenaga kerja Indonesia akan terpinggirkan. Para pengguna tenaga kerja akan lebih memilih mereka yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin tinggi, dan produktif. Karakteristik tenaga kerja tersebut tidak banyak dimiliki oleh TKI, bahkan nasib tenaga kerja trampil pun masih dipengaruhi oleh sistem dari negara asal penanam modal (Prasetyo, 2001).

Bila kondisi ini dibiarkan, maka tenaga kerja Indonesia akan menjadi penonton saja. Untuk itu perlu ada upaya yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing TKI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era global dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. **Peningkatan Mutu Pendidikan.** Mengingat betapa pentingnya peranan pendidikan, maka sektor ini harus memperoleh porsi yang besar dalam pembangunan. Sayangnya hingga kini sektor ini masih terseok-seok karena tiadanya kesungguhan pemerintah untuk mendongkrak sektor ini.
2. **Penguasaan Bahasa Asing.** Di era global saat ini bahasa asing merupakan sarana utama untuk berkomunikasi bisnis, kerjasama, pendidikan, alih teknologi, dan lain-lain. Untuk menjadi tenaga kerja di era global tidak cukup hanya berbekal ketrampilan tertentu saja, tetapi harus dibekali kemampuan tambahan, yakni salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Prancis, Jepang, Mandarin).
3. **Penguasaan teknologi informasi (TI).** Menurut Hartono (2002) TI merupakan kunci pokok bagi tenaga kerja untuk berkiprah di era global ini disamping harus menguasai teknologi informasi dan wawasan global pada abad 21. TI merupakan piranti terpenting abad ini. Hampir semua lembaga membutuhkan TI sebagai sarana untuk manajemen maupun untuk membantu pengambilan keputusan.
4. **Latihan kerja.** Latihan kerja merupakan tahapan penting yang mesti dilewati oleh para pencari tenaga kerja. Perlunya latihan kerja ini adalah untuk memperkenalkan para anak bangsa terdidik agar tidak gagap dalam memasuki dunia kerja.
5. **Penyempurnaan sistem informasi ketenagakerjaan.** Salah satu kelemahan manajemen ketenagakerjaan di Indonesia adalah lemahnya sistem informasi ketenagakerjaan (SIK). SIK dapat menyajikan peta ketenagakerjaan. Peta tersebut dapat memberikan informasi berapa jumlah pencari kerja, klasifikasi ketrampilan/spesialisasi, lapangan kerja apa saja yang tersedia atau potensial, di mana, berapa persentase yang dapat terserap tiap periode tertentu, bagaimana tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Adanya SIK ini bermanfaat bagi pemerintah dan tenaga kerja sendiri.

Dalam penyelenggaraan Presidensi G20 di Bali banyak Tantangan yang dihadapi Sumber Daya Manusia di Bali, salah satunya yang menjadi perhatian adalah minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia tentang Presidensi G20, serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Bali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Ayu Ade Tresya Dewi salah satu perwakilan Bank Indonesia yang terlibat dalam kegiatan G-20 (Tanggal 15 Juli 2022), tentu G20 menyimpan sejumlah kepentingan strategis. G20 merupakan forum yang mementingkan permasalahan ekonomi khususnya perdagangan, investasi dan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, melalui G20, Indonesia diharapkan akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur (Hermawan Y. P., 2017). Sejak pelantikannya sebagai Presiden, Jokowi tidak pernah absen menghadiri KTT G20. Hal ini mencerminkan *forward-thinking* perspektif Jokowi yang menyadari pentingnya G20 sebagai platform strategis untuk pencapaian visi nasionalnya. Posisi strategis Indonesia di G20 menentukan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia di bidang ekonomi dalam diplomasi ekonomi. Dalam Nawa Cita dan RPJMN dijelaskan Indonesia memiliki 5 orientasi kebijakan luar negeri yakni: (1) keamanan dan perdamaian, (2) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, (3) diplomasi ekonomi, (4) kerja sama ASEAN, dan (5) diplomasi maritim (Fitriani & Panduwinata, 2018).

Lebih lanjut, Menlu Retno Marsudi menyampaikan orientasi politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi 4+1 (Kementerian Luar Negeri, 2019). Diplomasi ini meliputi penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan dan global. Sementara plus satu-nya adalah penguatan infrastruktur diplomasi. Secara rinci, prioritas untuk memperkuat diplomasi ekonomi telah disiapkan yang terdiri dari enam langkah strategis. Penelitian ini menyoroti keenam langkah strategis dalam diplomasi ekonomi Indonesia di G20 ini.

Pertama, kapitalisasi penguatan pasar domestik. Langkah strategis kedua, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional. Langkah strategis diplomasi ekonomi Indonesia yang ketiga adalah penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Langkah keempat, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong *outbound investment*. Selanjutnya, langkah kelima adalah menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia. Pada poin ini Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi dan ekspor impor non-diskriminasi. Terakhir, yaitu langkah strategis keenam yang mendukung diplomasi ekonomi Indonesia yaitu, mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian diatas, (1) Sumber Daya Manusia (SDM) di Bali dalam penyelenggaraan Presidensi G20 memiliki peluang yang sangat besar mengingat Bali sebagai tuan rumah, hal ini akan berdampak kepada sektor ekonomi dan pariwisata di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyambut Presidensi G20 yang bertaraf Internasional, Sumber Daya Manusia di Bali mendapat peluang dalam menunjukkan pada dunia internasional tentang sumber daya yang ada di Bali, peluang yang muncul juga dari sector pariwisata, acara Internasional ini dapat menjadi media promosi Bali di mata dunia dalam sektor pariwisata. (2) Namun tantangan yang di hadapi pun tidak mudah, di antaranya adalah kurangnya keterlibatan Sumber Daya Manusia di Bali yang menjadi voluntir, rendahnya kualitas sumber daya manusia di bali yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang Prsidensi G20. (3) Straregi yang harus digunakan dalam memanfaatkan peluang serta menjawab tantangan adalah dengan

meningkatkan kualitas SDM, membuka lebih banyak sektor ekonomi untuk investasi, menyiapkan infrastruktur ekonomi dan industri, dan meningkatkan pendidikan nasional perlu dihiraukan untuk menarik lebih banyak investasi asing. Sebagai negara yang salah satu kekuatannya berasal dari perdagangan, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas perdagangannya adalah dengan mengurangi tingkat kemiskinan selain dengan meningkatkan daya saing di tengah liberalisasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitas industri manufaktur karena bukan hanya dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya tetapi juga memberi *value-added*.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah: (1) Meningkatkan mutu Pendidikan bagi masyarakat. (2) Pemerintah harus lebih ketat dalam penggunaan karyawan asing di perusahaan ataupun acara-acara bertaraf internasional di Indonesia. (3) Sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat perihal setiap acara yang bertaraf internasional akan di adakan di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthonius. P. Sitepu (2011). Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Edy, Sutrisno. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit: Jakarta, Kencana.
- Hartono, Jogiyanto. (2002). Metodologi Penelitian Sistem Informasi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mill Robert Christie and Morrison. 1985. *The Tourism System*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
- Perpu Nomor 1 Tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- PP Nomor 23 Tahun 2020 kemudian telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020
- Pitana, I Gde dan Gayatri Putu G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.
- Sukirno, Sadono. (2015). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sorensen, Robert Jackson and Georg. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soehardi Sigit. (1999). Pengantar Metode Penelitian Sosial Bisnis Manajemen, Cetakan Pertama, Likman Offset, Yogyakarta.